

FORMULIR PENDAFTARAN K.KKPR NONBERUSAHA

Nomor : Sleman,
Perihal : Pendaftaran K.KKPR Kepada Yth.
Nonberusaha Nonberusaha Yth Bupati Sleman
melalui Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Sleman

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan pendaftaran K.KKPR-Nonberusaha untuk kegiatan dengan data sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON

A. PERORANGAN/BADAN HUKUM

1. Nama/Pengurus/Direktur :
2. NIK :
3. Alamat :
RT: RW:, Padukuhan:
Kalurahan: Kecamatan:
4. No Hp/WA :
5. Jabatan :
6. Badan/PT/Yayasan :
7. Nomor dan Tanggal :
 - A. Akta Pendirian :
 - B. Akta Perubahan Terakhir :
 - C. Pengesahan Awal :
 - D. Pengesahan Perubahan Terakhir :
8. Alamat Badan/PT/Yayasan :
RT: RW:, Padukuhan:
Kalurahan: Kecamatan:

9. NPWP (*apabila pemohon berbentuk badan*) :

10. Email Aktif :

II. KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)

Judul KBLI : (terlampir jika lebih dari satu)

Modal Investasi (diluar tanah dan bangunan) : (Juta / Milyar)

III. DATA HAK ATAS TANAH :

1. Lokasi tanah

a. Nomor/Jalan :

b. Padukuhan : RT: RW:

c. Kalurahan :

d. Kecamatan :

2. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst

3. Luas tanah : m²/Ha

4. Rencana jumlah lantai bangunan : lantai

5. Rencana luas lantai bangunan : m²

6. Bukti hak atas tanah

a. Status dan nomor hak atas tanah

1) SHM / HGB / Hak Pakai / Letter C / Model D / Model E / SG *)

Nomor :

Surat Ukur/ G. :
Situasi

2) SHM / HGB / Hak Pakai / Letter C / Model D / Model E / SG *)

Nomor :

Surat Ukur/ G. :
Situasi

b. Status penggunaan : milik sendiri / sewa / kerjasama / pinjam pakai *)

c. Keadaan tanah : sawah / tegal / darat / pekarangan *)

7. Kondisi tanah saat ini : terbangun/belum terbangun *)

*) coret yang tidak perlu

IV. LAMPIRAN PERSYARATAN

1. Kartu tanda penduduk pemohon perorangan atau kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon KKPR badan (pdf maks. 500 kb);
2. Surat kuasa pengurusan KKPR bermaterai cukup dan kartu tanda penduduk penerima kuasa (pdf maks. 500 kb);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah pemohon (*apabila pemohon berbentuk badan*) (pdf maks. 500 kb);
4. Akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (*apabila pemohon berbentuk badan*) (pdf maks. 1000 kb);
5. Proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit jenis kegiatan secara spesifik, latar belakang, tujuan, dan uraian kegiatan (*apabila pemohon berbentuk badan*) (pdf maks. 2000 kb);
6. polygon lokasi kegiatan (bidang tanah) pada aplikasi google earth dalam format KMZ
7. Dokumen hak atas tanah (pdf maks. 1000 kb);
8. Surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah (pdf maks. 500 kb);
9. Gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan apabila pemohon KKPR telah memiliki dan/atau menguasai tanah (pdf maks. 500 kb);
10. Surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan KKPR, dan tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa (pdf maks. 500 kb);
11. Berkas permohonan scan dan diupload sesuai aslinya. (bukan hasil foto hp tidak diperkecil/diperbesar);
12. Pendaftaran lewat aplikasi SINOM : perizinan.slemankab.go.id.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

PAKTA INTEGRITAS
PENGURUSAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan dalam lembaga/ institusi :
Nama lembaga/ institusi :
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Kabupaten Sleman, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Kabupaten Sleman, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Apabila saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, saya bersedia menerima pembinaan dan pengawasan serta sanksi dari pejabat yang berwenang.
7. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Saya yang membuat
pernyataan, Pemohon

Meterai Rp 10.000,-
Stempel Perusahaan

.....